

Daftar Isi

Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	v
Sambutan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.....	vi
Sambutan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran.....	viii
Testimoni Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri.....	ix
Prakata	x
Tentang Penulis	xiii
Daftar Isi	xiv
BAB 1 PEMERINTAHAN PRAKEMERDEKAAN.....	1
A. Pemerintahan Pra Konolial	1
B. Pemerintahan Masa VOC.....	5
C. Pemerintahan Masa Hindia Belanda Abad Ke-19 (1800–1905)	28
D. Pemerintahan Masa Hindia Belanda Abad Ke-20 (1905–1942)	35
E. Pemerintahan Masa Pedudukan Militer Jepang (1942–1945)	41
BAB 2 PEMERINTAHAN MASA KEMERDEKAAN	43
A. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah	43
B. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 1 Tahun 1945	48
C. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 22 Tahun 1948	49
D. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah Konstitusi RIS 1949	52
E. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 1 Tahun 1957	54
F. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.....	57
G. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 18 Tahun 1965 <i>juncto</i> UU Nomor 19 Tahun 1965	58
H. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 5 Tahun 1974	59
I. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 22 Tahun 1999	61
J. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 32 Tahun 2004	62
K. Pemerintah Lokal/Daerah di Bawah UU Nomor 23 Tahun 2014	63
BAB 3 KONSEP DAN TEORI PEMERINTAHAN.....	65
A. Konsep dan Teori	65
B. <i>Staatsrecht</i> dan <i>Adat Staatsrecht</i>	66
C. <i>Binnenlandsche Bestuur</i> (Pemerintahan Dalam Negeri)	67
D. Pemerintahan Pangreh Praja.....	68
E. <i>Zelfbestuur Landschap</i> (Daerah Swapraja)	69
F. <i>Inlandsche Geeente</i> (Haminte Pribumi) dan Persekutuan Hukum Asli/Pribumi	70
G. <i>Voogding</i> (Perwalian)	71
H. <i>Ontvoogding</i> (Penghapusan Perwalian).....	71
I. Asimilasi dan Asosiasi.....	72
J. <i>Erkenning</i> (Pengakuan).....	72
K. <i>Locale Ressort, Locale Bestuur, Locale Raad, dan College</i>	73
L. <i>Zelfstandige Regerende van Locale Rechtsgemeenschap</i> (Badan Hukum Komunitas Lokal/Daerah yang Bebas Mengatur dan Mengurus Urusan Rumah Tangganya)	74

M.	Pemerintah Lokal Administratif/Wilayah Administrasi	75
N.	<i>Local Government</i> , Daerah Otonom, dan Otonomi Daerah	78
O.	Daerah Otonom Besar dan Daerah Otonom Kecil	82
P.	Daerah Khusus dan Daerah Istimewa	84
Q.	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (<i>Tribal and Indegenous Poeples</i>)	86
R.	Instansi Vertikal (<i>Field Administration</i>)	86
S.	Birokrasi Lokal	87
T.	Administrasi Pemerintahan Daerah	88
U.	Tipologi Pemerintahan Daerah	92
V.	Sistem Rumah Tangga Daerah	94
W.	Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah	96
BAB 4 ASAS-ASAS PEMERINTAHAN		99
A.	Pengertian	99
B.	<i>Besturen Is Vooruitzien</i> (Memerintah Adalah Memandang Jauh Ke Depan)	99
C.	Kepastian dalam Perubahan	100
D.	Keserasian Tujuan dengan Motif, Cara, dan Alat	100
E.	Profesionalisme	100
F.	<i>Nobless Oblige</i>	101
G.	<i>Tat Twam Asi</i> (Dia Adalah Kamu)	101
H.	<i>Omnipresence</i> (Selalu Hadir, Hadir di Mana-mana)	102
I.	<i>Freies Ermessen</i>	102
J.	<i>Good Governance</i>	102
K.	<i>Erkenning/Recodnition</i> (Pengakuan)	103
L.	Konsentrasi	104
M.	Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi	105
N.	Asas Otonomi (<i>Autonomie Beginsel</i>) dan Tugas Pembantuan (<i>Medebewind</i>)	116
O.	Subsidiaritas	120
BAB 5 PEMERINTAHAN DESA		121
A.	Asal Usul Pemerintahan Desa	121
B.	Desa Zaman Penjajahan	124
C.	Desa Zaman Awal Kemerdekaan Sampai dengan Zaman Orde Lama	128
D.	Desa Zaman Orde Baru dan Orde Reformasi Menjadi Korporatisme Negara	128
BAB 6 KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		131
A.	Pengertian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	131
B.	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Masih Ada	134
C.	Negara Mengakui dan Menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	136
BAB 7 DAERAH OTONOM ISTIMEWA DAN DAERAH OTONOM KHUSUS		137
A.	Teori dan Praktik Otonomi Asimetris	137
B.	Pengaturan Daerah Otonom Istimewa	138
C.	Daerah Otonom Istimewa	140
D.	Daerah Otonom Khusus	149
BAB 8 MODEL PEMERINTAHAN DAERAH		153
A.	Model Pemerintahan Daerah	153
B.	Model Prancis	153

C. Model Jerman	157
D. Model Inggris	160
E. Model Amerika Serikat	162
F. Model Uni Soviet dan Negara-Negara Komunis	166
BAB 9 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, NEGARA BAGIAN, DAN PEMERINTAH LOKAL/DAERAH	169
A. Hubungan Antarpemerintahan	169
B. Hubungan Pemerintahan yang Dikiblati Negara-Negara di Dunia	170
C. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia	176
D. Keberadaan Wakil Pemerintah dalam Hubungan Antar Pemerintahan	181
E. Hubungan Pusat, Negara Bagian, dan Pemerintah Lokal/Daerah dalam Sistem Federasi	183
F. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal dalam Sistem Negara Kesatuan	186
G. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan UUD 1945 dan UUD NRI 1945	188
H. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945 (Sesudah Amandemen)	192
BAB 10 STRUKTUR ORGANISASI DAN WEWENANG PEMERINTAH LOKAL/DAERAH	195
A. Struktur Pemerintah/Lokal Daerah	195
B. Model Dua Hirarki (<i>Dual Hierarchy Model</i>)	195
C. Model Menyatu atau Satu Hirarki (<i>Fused Or Single Hierarchy Model</i>)	196
D. Model Hirarki Terpisah (<i>Split-Hierarchy Model</i>)	198
E. Pengertian Wewenang	198
F. Wewenang Pemerintah Lokal/Daerah	199
G. Distribusi Kewenangan Pemerintahan	201
H. Cara Penyerahan Kewenangan	203
I. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal/Daerah di Indonesia	204
BAB 11 KEUANGAN DAERAH	207
A. Pengertian Keuangan Daerah	207
B. Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah	208
C. Karakteristik Keuangan Daerah	208
D. Keuangan Daerah dan Keuangan Nasional	208
E. Asas Operasional Keuangan Daerah	209
F. Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Keuangan Daerah	210
G. Penganggaran Pemerintah Lokal/Daerah	210
H. Penerimaan Lokal (<i>Local Revenues</i>)	213
I. Pengeluaran Pemerintah Lokal (<i>Local Government Expenditure</i>)	214
J. Dana Pemerintah Lokal (<i>Local Government Funds</i>)	215
K. Analisis Keuangan Pemerintah Lokal (<i>Local Government Financial Analysis</i>)	215
L. Keuangan Daerah Berdasarkan UU No. 23/2014 Jo. UU No. 1/2022	217
BAB 12 LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH OTONOM	219
A. Pengertian Lembaga	219
B. <i>Local Raad</i> (Dewan Lokal/Daerah)	220
C. Pelaksana Urusan Rumah Tangga Daerah Otonom	228

D. Pelaksana Teknis Urusan Rumah Tangga Daerah Otonom	235
E. Wakil Pemerintah Pusat	239
BAB 13 DAERAH OTONOM KOTA, DAERAH OTONOM KABUPATEN, DAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA	247
A. Pemerintah Daerah Otonom Kota	247
B. Daerah Otonom Kabupaten	261
C. Pemerintahan Tradisional Masyarakat Desa	266
BAB 14 SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH DAERAH	273
A. Sistem Kepegawaian Daerah	273
B. Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah	275
C. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Daerah	275
BAB 15 KEBIJAKAN DAERAH	277
A. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik	277
B. Desain Kebijakan Daerah	278
C. Koordinasi dalam Pelaksanaan Kebijakan	282
D. Sukses dan Gagalnya Pelaksanaan Kebijakan	283
E. Evaluasi Kebijakan Publik	284
F. Cara Mengevaluasi Kebijakan	287
G. Hasil Evaluasi Kebijakan Publik	288
BAB 16 PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH	289
A. Pengertian Publik dan Pelayanan Publik	289
B. Negara Menyediakan Barang Publik dan Jasa Publik kepada Warga Negara	293
C. Jenis-Jenis Pelayanan Publik	298
D. Kesejahteraan Masyarakat adalah Ukuran Berhasil Tidaknya Pelayanan Publik	299
E. Biaya Pelayanan Publik	302
BAB 17 KONTROL TERHADAP PEMERINTAH DAERAH	305
A. Filsafat Kontrol	305
B. Model Kontrol terhadap Pemerintah Lokal/Daerah	305
C. Jenis-Jenis Kontrol	308
D. Kontrol Eksternal (Dari Luar Pemerintah Daerah)	309
E. Kontrol Internal (Oleh Pemerintah Daerah Sendiri)	315
F. Kontrol Politik (<i>Council Control</i>)	316
G. Kontrol Peradilan	317
H. <i>Judicial Review</i> terhadap Semua Peraturan di Bawah Undang-Undang	318
I. Kontrol terhadap Putusan Pejabat Tata Usaha Negara	318
J. Kontrol terhadap Tindak Pidana Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara ...	319
K. Kontrol Masyarakat	320
K. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara	321
BAB 18 DAERAH OTONOM KE DEPAN	323
Daftar Pustaka	339